



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 061/Kep.4621-ORG/2025
TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN
PENGAWAS PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas jabatan dibutuhkan Standar Kompetensi Jabatan sebagai persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, dalam menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara berbasis sistem merit, setiap instansi pemerintah harus menyusun Standar Kompetensi ASN;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Standar Kompetensi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1606);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 298);

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);
12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 29);

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/506/M.SM.02.00/2024 tanggal 02 Juli 2024 Hal Persetujuan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Kompetensi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- KEDUA : Daftar Standar Kompetensi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Rincian Standar Kompetensi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Unsur Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
a. identitas jabatan;
b. kompetensi jabatan; dan
c. persyaratan jabatan.
- KELIMA : Identitas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a, terdiri atas:
a. nama jabatan;
b. uraian/ihtisar jabatan; dan
c. kode jabatan.
- KEENAM : Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b, terdiri atas:
a. kompetensi teknis;
b. kompetensi manajerial; dan
c. kompetensi sosial kultural.

- KETUJUH : Persyaratan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf c, terdiri atas:
- a. pangkat;
 - b. kualifikasi pendidikan;
 - c. jenis pelatihan;
 - d. ukuran kinerja jabatan; dan
 - e. pengalaman kerja.
- KEDELAPAN : Standar Kompetensi Jabatan bertujuan untuk digunakan sebagai acuan dalam:
- a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pengembangan karir;
 - d. pengembangan kompetensi;
 - e. penempatan;
 - f. promosi dan/atau mutasi;
 - g. uji kompetensi;
 - h. sistem informasi manajemen; dan
 - i. kelompok rencana sukses.
- KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Oktober 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPANTABAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 061/Kep.4621-ORG/2025
TENTANG STANDAR KOMPETENSI
JABATAN ADMINISTRATOR DAN
JABATAN PENGAWAS PADA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA

DAFTAR STANDAR KOMPETENSI JABATAN ADMINISTRATOR DAN
JABATAN PENGAWAS PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	STANDAR KOMPETENSI JABATAN	KODE JABATAN
1	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	2-04-54-13-25-100
2	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2-05-54-13-25-110
3	Kepala Sub Bagian Keuangan	2-05-54-13-25-120
4	Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi	2-05-54-13-25-130
5	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur	2-04-54-13-25-200
6	Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan	2-05-54-13-25-210
7	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur	2-05-54-13-25-220
8	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	2-04-54-13-25-300
9	Kepala Seksi Ketertiban Umum	2-05-54-13-25-310
10	Kepala Seksi Ketentraman Masyarakat	2-05-54-13-25-320
11	Kepala Bidang Penegakkan Produk Hukum Daerah	2-04-54-13-25-400
12	Kepala Seksi Deteksi Dini dan Pencegahan	2-05-54-13-25-410
13	Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan	2-05-54-13-25-420
14	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	2-04-54-13-25-500
15	Kepala Seksi Bina Potensi	2-05-54-13-25-510
16	Kepala Seksi Mobilisasi	2-05-54-13-25-520

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR
TENTANG STANDAR KOMPETENSI
JABATAN ADMINISTRATOR DAN
JABATAN PENGAWAS PADA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA

9. Perikat Bangsa	2	Aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan	2.1. Menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan		
			2.2. Membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan		
			2.3. Bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan dan frustrasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerjanya.		
C. Teknis					
III. PERSYARATAN JABATAN					
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat Pentingnya Terhadap Jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A. Pendidikan	1. Jenjang	Diploma III (DIII)		✓	
	2. Bidang Ilmu	Ilmu Pemerintahan/ Sosial/ Administrasi Negara/ Manajemen//Hukum/Komunikasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan			✓
B. Pelatihan	1. Manajerial	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas		✓	
	2. Teknis	Diklat Manajemen pengawasan, Diklat Standar Pelayanan Minimal		✓	
	3. Fungsional				
C. Pengalaman Kerja		4 (empat) tahun Jabatan pengawas atau Jabatan Fungsional jenjang ahli muda bidang (bidang tugas Jabatan yang akan diduduki		✓	
D. Pangkat / Golongan		Penata (III/c)			
E. Indikator Kinerja Jabatan		1. Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			

WALI KOTA BANDUNG.
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA NUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002